

DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA

Reni Ria Armayani Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

reniriaarmayani@uinsu.ac.id

Siti Aisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

sitiaisa@gmail.com

Abstract

President Jokowi has announced plans to move the country's capital city (IKN) to East Kalimantan Province. This IKN transfer must be carefully planned because there are potential positive impacts as well as risks. The background of moving the IKN is that the burden on DKI Jakarta as the center of government and business center is too high. The transfer of IKN also aims to reduce economic inequality between Java and outside Java. Therefore, this paper will analyze the economic impact along with the risks of moving the IKN that the government must anticipate. In the economic aspect, there is potential for an increase in GDP accompanied by a controlled inflation rate. However, there is a risk of financing originating from the State Budget, BUMN, business entities and the private sector. The government must pay attention to the cooperation scheme with these parties considering the construction of a 'new city' and its infrastructure carries a high risk. In addition, there is potential for more than expected inflation stemming from the increase in land prices. The DPR RI monitors the progress of the IKN transfer plan through the supervisory function mechanism.

Keywords: inflation, monetary operations, open market operations, sharia monetary operations, sharia open market operations

Abstrak

Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko. Latar belakang pemindahan IKN adalah beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampaui tinggi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis dampak ekonomi beserta risiko pemindahan IKN yang harus diantisipasi pemerintah. Dalam aspek ekonomi, terdapat potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah 'kota baru' beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Selain itu terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari

kenaikan harga lahan. DPR RI memantau perkembangan rencana pemindahan IKN melalui mekanisme fungsi pengawasan.

Kata kunci: *Ibukota Negara, Kepadatan Penduduk, APBN, Dampak Ekonomi dan Antisipasi Resiko*

Pendahuluan

Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat padatnya penduduk terkhusus Pulau Jawa, Indonesia kini menanggulangnya dengan cara memindahkan Ibu kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur.

Dampak pemekaran yang akan terjadi pada lokasi ibukota negara yang baru yakni dengan melihat adanya asumsi variabel dan menentukan wilayah yang paling memberi tarikan dan membawa dampak pertumbuhan ke sekitarnya, guna bermanfaat untuk perekonomian nasional. Sejauh ini, Jakarta masih mendominasi perputaran ekonomi di Indonesia. Beberapa pihak mengklaim dengan adanya perpindahan ibukota, maka perekonomian menjadi lebih merata, tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja.

Dalam perpindahan ibukota negara juga berpengaruh terhadap inflasi hanya saja karena proyek ini dilakukan secara bertahap maka dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Untuk dampak yang akan terjadi pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tahapan perencanaan. Apabila perencanaan yang dilakukan benar-benar matang, efek pertumbuhan ekonomi perkiraan dapat tumbuh dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam kajian yang telah dilakukan pemindahan ibukota mampu meningkatkan perekonomian 0,1-0,2% karena adanya dorongan investasi baru.

Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menambahkan bahwa kesenjangan daerah secara agregat telah menghambat angka pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dengan rencana pemindahan IKN,

pemerintah berharap dapat mengakselerasi pemerataan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Beberapa negara sudah melakukan pemindahan IKN di antaranya Brazil yang memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia yang memindahkan ibu kotanya dari Sydney ke Canberra. Alasan utama dari pemindahan IKN di dua negara tersebut adalah membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk. Contoh kasus pemindahan IKN di Brazil menunjukkan tidak terdapat kerugian ekonomi yang terjadi di Rio de Janeiro sekaligus tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Brasilia.

Di sisi lain ada beberapa risiko dari pemindahan IKN keluar Pulau Jawa. Risiko terutama terkait dengan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dari aspek pembiayaan, walaupun pemerintah sudah menyatakan hanya 19,2% dari total kebutuhan anggaran Rp446 triliun ditanggung oleh APBN, namun terdapat risiko penambahan beban anggaran negara apabila terjadi kegagalan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas dampak ekonomi dan antisipasi risiko dalam proses pemindahan IKN.

Kajian Literatur

Pemindahan ibu kota yang tengah direncanakan oleh pemerintah ternyata memiliki dampak ekonomi pada daerah baru tersebut. Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar pulau Jawa tidak akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensial yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Nantinya, dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi +0,1%.

Kemudian, pemindahan ibu kota akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan dan indikasi ketimpangan akan menyempit. Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih terdiversifikasi ke arah sektor yang lebih padat sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional. Ketiga, pemindahan ibu kota akan menyebabkan tambahan inflasi nasional yang minimal

sebesar 0,3% basis poin walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan. Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam.

Selanjutnya, pemindahan ibu kota Negara ke luar pulau Jawa akan mendorong perdagangan di dalam provinsi ibu kota baru. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Kota Negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik.

Pemindahan ibu kota Negara juga akan mendorong investasi di ibu kota baru dan sekitarnya. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional.¹

Disisi lain, yang harus diperhatikan adalah penyebaran tenaga kerja yang berkecimpung untuk pembangunan proyek perpindahan IKN, yang menurut datanya 56% merupakan penduduk Pulau Jawa. Penduduk Kalimantan hanya menyumbang sekitar 8% dari jumlah proyek. Sedangkan untuk material seperti semen, pasir, batu, krikil, besi, baja, dll dan peralatannya seperti alat berat, mesin telah tersedia. Biaya yang diperlukan untuk material dan peralatannya sangat mahal, apalagi sebagian bahan baku harus disatangkan dari luar Pulau Jawa.

Ketimpangan Ekonomi Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa

Ketimpangan ekonomi merupakan dampak dari tingginya disparitas pembangunan antarwilayah. Ketimpangan ekonomi dalam suatu negara bila tidak segera disikapi dengan kebijakan yang tepat akan berdampak kepada permasalahan multidimensi. Urgensi mengatasi ketimpangan semakin penting bila dikaitkan dengan kecenderungan bahwa sebuah wilayah yang sudah lebih maju akan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan wilayah yang masih tertinggal.

Oleh karena itu, pemerintah, baik di negara yang menganut sistem perekonomian pasar maupun terpusat akan mengarahkan pembangunan untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Dengan semakin kecilnya disparitas antar wilayah, maka potensi percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan

semakin tinggi. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa terjadi pada banyak aspek. Dari aspek populasi, jumlah penduduk di Pulau Jawa mencapai 56,56% dari total penduduk Indonesia. Di sisi lain jumlah penduduk yang menempati wilayah selain Pulau Jawa berada di bawah angka 10% (kecuali penduduk Sumatera sebesar 21,78%).

Besarnya populasi menyebabkan daya dukung Pulau Jawa semakin menurun, terutama dalam hal penyediaan lahan dan air bersih. Khusus untuk DKI Jakarta, kemacetan dan kurangnya akses transportasi publik menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp56 triliun per tahun (Bappenas, 26 Juni 2019). Dari aspek ekonomi, sebesar 58,49% kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional disumbang oleh Pulau Jawa, di mana wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyumbang sebesar 20,85%. Ironisnya, wilayah lain hanya mampu berkontribusi kurang dari separuh kontribusi PDRB dari Pulau Jawa. Kontribusi ini juga berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi di mana Pulau Jawa mencatat angka 5,61% pada tahun 2017; lebih tinggi dibandingkan mayoritas wilayah lain di Indonesia.² Kontribusi PDRB dan pertumbuhan ekonomi dari wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1. Besarnya PDRB di Pulau Jawa tidak terlepas dari keberadaan industri dan bisnis yang sudah lama terbangun. Menurut data Badan Pusat Statistik pada triwulan-I 2019 secara nasional Pulau Jawa menyumbang PDRB sebesar 59,03%. (BPS,2019). Khusus untuk DKI Jakarta, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, Mass Rapid Transit, dan Light Rapid Transit berperan besar dalam mendorong laju pertumbuhan PDRB.³ Keberadaan industri dan infrastruktur tersebut akan membawa dampak langsung terhadap percepatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Konsep pertumbuhan menekankan bahwa pusat perekonomian tidak akan muncul secara alami. Pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak akan muncul tanpa dorongan inovasi dan teknologi oleh perusahaan/industri yang beraglomerasi di suatu wilayah. Skema hinterland memungkinkan sebuah wilayah yang sudah stabil dapat memberikan dampak ekonomi kepada wilayah yang berlokasi di sekitarnya.⁴

Teori inilah yang menjelaskan perkembangan ekonomi di wilayah penyangga DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum semakin cepat dibandingkan wilayah lain.

Dengan demikian pemerintah harus mengintervensi percepatan pertumbuhan yang terlalu berpusat di DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan cara pemindahan IKN dan membentuk wilayah pertumbuhan ekonomi baru.

Dampak Pemindahan IKN Terhadap Perekonomian

Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumberdaya daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produktif dan pembukaan lapangan kerja bagi sumberdaya manusia terampil yang selama ini belum termanfaatkan. Secara spesifik Bappenas memperhitungkan akan terjadi peningkatan upah tenaga kerja bagi wilayah sekitar yang dicerminkan dengan kenaikan price of labour sebesar 1,37%.⁵

Di sisi lain rencana pemindahan IKN juga berdampak terhadap kenaikan inflasi secara nasional. Bambang Brodjonegoro memperkirakan akan terdapat kenaikan inflasi sebesar 0,2% selama proses perpindahan IKN. Kenaikan inflasi berasal dari perbaikan pendapatan masyarakat yang tentunya juga diikuti oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Namun inflasi tersebut diperkirakan tidak akan terlalu mempengaruhi daya beli secara nasional karena kenaikan harga hanya terpusat di lokasi IKN baru dan wilayah sekitarnya.⁶

Untuk memastikan perkembangan IKN baru, Bappenas merencanakan akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Bambang Brodjonegoro memperkirakan secara nasional akan terjadi peningkatan arus perdagangan sebesar 50% sebagai dampak pertumbuhan kawasan industri di IKN yang terhubung dengan wilayah lain di Indonesia. Momentum penambahan porsi investasi dan perdagangan selanjutnya dibarengi dengan kebijakan prioritas hilirisasi industri.

Dengan demikian akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan PDRB lokal. Dengan bauran kebijakan tersebut, pemindahan IKN diprediksi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tingkat inflasi yang terjaga. Secara agregat kesejahteraan masyarakat di lokasi IKN baru akan meningkat dan berpotensi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.

Risiko Pemindahan IKN

Selain potensi ekonomi, pemindahan IKN juga memiliki risiko yang harus diantisipasi oleh Pemerintah. Risiko pertama terkait pembiayaan dari keperluan pemindahan IKN. Bappenas memperhitungkan bahwa ada dua skenario kebutuhan total pembiayaan berdasar desain dari IKN, yaitu sebesar Rp466 Triliun dan Rp323 Triliun. Skenario kebutuhan pembiayaan sangat bergantung kepada fungsi pemerintahan dan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembangunan fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang, dan pengadaan lahan.⁷

Proyek pembangunan 'kota baru' menuntut penyediaan infrastruktur yang masif. Karakteristik proyek infrastruktur adalah memiliki risiko jangka panjang terutama berasal dari kinerja proyek yang belum tentu sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Di sisi lain pihak swasta tentu mengharapkan realisasi keuntungan yang sesuai dengan kalkulasi di awal proyek. Dengan prinsip pembagian risiko, pemerintah harus benar-benar memperhatikan perjanjian kerja sama dengan pihak badan usaha atau swasta sehingga kualitas IKN baru beserta infrastruktur pendukung dapat sesuai dengan spesifikasi yang mendukung jalannya pemerintahan dan tidak lagi memberikan beban tambahan bagi APBN.

Sementara dari sisi makro, Ikatan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan kenaikan inflasi akan lebih besar daripada perhitungan Bappenas. REI memperkirakan kontribusi inflasi terbesar berasal dari kenaikan harga lahan, apalagi terdapat luasan lahan yang dikuasai hanya oleh beberapa pihak.⁸ Keberadaan para spekulasi juga dapat memperbesar kemungkinan meningkatnya harga lahan secara tidak terkendali.

Untuk mengantisipasi hal ini pemerintah harus merencanakan lokasi dan tata ruang wilayah secara tepat disertai dengan pengadaan yang sedapat mungkin berasal dari lahan yang dikuasai negara atau BUMN. Penggunaan lahan tersebut dapat dilakukan dengan skema pendayagunaan aset yang tidak membebani anggaran negara. Dengan demikian risiko tingginya inflasi yang berasal dari kenaikan harga lahan dapat diminimalisir.

Benarkah Pindahan Ibu Kota Menyebabkan Tambahan Inflasi Nasional Yang Minimal.

Walaupun pemindahan ibu kota baru akan menyebabkan tekanan dari sisi permintaan, tetapi dampak terhadap inflasi nasional akan minimal. Tambahan inflasi minimal akibat pemindahan ibu kota baru ialah 0,2% Basis Poin. Dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam.

Hal ini berarti jika baseline inflasi seperti tahun lalu yakni 3,13 persen, berarti dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan bertambah menjadi 3,33 persen.⁹ Dampak positif lainnya dari pemindahan ibu kota diantaranya yaitu, akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Dan selanjutnya dampak positif lain dari pemindahan ibu kota yaitu, mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia yaitu pulau Jawa ke provinsi luar pulau Jawa.

Efek positif tersebut disebabkan adanya penggunaan dari sumber daya potensi yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Pemindahan ibu kota negara ke wilayah di luar pulau Jawa tidak akan menyebabkan kontaksi ekonomi di wilayah lain jika lokasi alternatif ibu kota memiliki sumber daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain.

Pemindahan IKN Akan Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Pendapatan

Efek pemindahan ibu kota terhadap penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan ialah pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih padat karya, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

Dengan mendorong perekonomian yang lebih padat karya dapat penurunan tingkat kesenjangan pendapatan tersebut terlihat dari persentase kenaikan harga modal sebesar 0,23% dan kenaikan harga tenaga kerja sebesar 1,37%. Kenaikan harga tenaga kerja tersebut akan diiringi dengan kenaikan produk marginal tenaga

kerja. Satu-satunya indikasi yang mungkin dianggap memberikan dampak negatif adalah bahwa pemindahan ibu kota bisa menyebabkan tambahan inflasi.

Kegiatan membangun ibu kota baru tersebut hanya akan menambah sedikit inflasi menjadi 3,30% dari 3,12% base inflasi dapat tahun lalu masih pada batas yang bisa ditoleransi dan dampaknya relatif minimal.¹⁰ Kenaikan harga tenaga kerja tersebut akan diiringi dengan kenaikan produk marginal tenaga kerja.

Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis library research, dimana untuk mengenalisis tentang perubahan ibu kota negara, perlu adanya referensi yang terkait baik berupa updating baik koran, majalah atau yang lainnya. Adapun referensi utama (data primer dari beberapa stragnews di berbagai media massa yang terkait dengan pemindahan ibu kota negara sebagai solusi pembangunan merata dan kesejahteraan, atau boleh dikatakan bahwa penelitian ini yakni penelitian analisis teks media (ATM) yang bersifat non kanchah, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis, karena mengandalkan dokumentasi berupa iklan di media televisi, serta menggunakan teori-teori dari buku sebagai literatur. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita tentang perpindahan ibukota Negara Indonesia.

Jenis data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data berupa berita online di berbagai media. Sedangkan data-data pendukung atau pelengkap data utama adalah buku-buku ataupun literatur lainnya yang menunjang dan ada kaitannya dengan bahasan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi berupa berita di media online maupun di televisi yang didapatkan dari youtube. Data-data ini nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan yang telah disistematisir dalam kerangka penulisan laporan. Adapun dalam penelitian kali ini objek penelitian ini adalah bagaimana dampak dan resiko dari perpindahan ibu kota. Untuk mendapatkan hasil yang sistematis dalam penelitian ini, maka perlu dilakukan tahap-tahap penelitian yang sistematis sebagai langkah untuk

mempermudah dan mempercepat dalam proses penelitian. Adapun tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menentukan tema di mana peneliti lebih banyak melakukan pengamatan terhadap data berupa dokumen.
2. Mencari topik yang menarik, dalam penelitian ini topik yang menarik bagi peneliti adalah menemukan dampak dan resiko perpindahan ibu kota.
3. Merumuskan masalah di mana jenis penelitian yang berpijak pada kemenarikan topik, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, hingga pada rasionalitas mengapa sebuah topik diputuskan untuk diuji. Dalam merumuskan masalah, peneliti menentukan banyak opsi untuk merumuskan masalah. Hal ini peneliti lakukan agar dapat merumuskan masalah sesuai dengan tema yang dipilih.
4. Menentukan metode penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
5. Menentukan metode analisis dengan tujuan kajian yang dilakukan dalam penelitian.
6. Melakukan analisis data yang didasar pada aspek ideologi, interpretan kelompok, frame work budaya, aspek sosial, komunikatif tidaknya sebuah pesan yang terkandung dalam lambang tersebut.
7. Menarik kesimpulan sebagai jawaban dari tujuan penelitian yang berada pada tataran konseptual/teoritis sehingga peneliti harus menghindari kalimat-kalimat empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara detail dan mendalam terhadap objek kajian yang diteliti, yakni Berita dari berbagai media baik online maupun dari televisi. Data dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa tayangan berita yang diunduh melalui internet. Selanjutnya ada data pendukung yang berasal dari tangan kedua atau ketiga, dan dalam penelitian ini data pendukung yang peneliti gunakan adalah kajian pustaka dari buku-buku, ataupun literatur lain yang terkait dengan pembahasan skripsi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan analisis semiotik sebagai acuan dalam menggali fenomena tersebut. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani *Semeion* yang berarti

tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain.

Pembahasan

Analisis garis besar aspek keruangan, ekologis dan kewilayahan serta dampak sosial, ekonomi dan politik, menghasilkan suatu pemikiran bahwa:

1. Pemandahan ibu kota merupakan suatu keharusan, tetapi dengan tenggang waktu, dan seharusnya tidak sebagai wacana lagi.
2. Ibu kota negara tetap di Jakarta tetapi pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan dialihkan keluar Jakarta.

Secara keruangan Jakarta sudah terlalu padat penduduk, sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan tata ruangnya semrawut, pemanfaatan yang lahan yang saling kontradiktif banyak terjadi. Pembangunan fisik terus dipacu tanpa arah yang jelas. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang sedemikian bagus disusun bang Ali, (1966-1977), dengan mudahnya dapat berubah sehingga banyak peruntukan kota yang dilanggar. Banyak situ-situ yang berfungsi sebagai penampung air hilang menjadi perumahan. Program proyek kali bersih (prokasih) macet total. Tiga belas kali yang membelah kota ini tetap menjadi kubangan sampah. Rencana induk 1965-1985 tidak berkelanjutan pada Rencana Induk 1985-2005, sangat dimungkinkan campur tangan pihak pengusaha, terutama developer dengan para pejabat Pemda Jakarta.

Jajak pendapat terhadap karyasiswa Program S2 Geografi menghasilkan pandangan bahwa ibu kota negara perlu disampaikan meskipun belum disertai dengan argumentasi yang matang. Daerah yang diusulkan untuk dipilih pemindahan ibu kota negara adalah: tetap di pulau Jawa di luar Jakarta, Kalimantan, dan Sumatra. Sebelum menentukan alternatif untuk menentukan pilihan lokasi pemindahan ibu kota negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan ibu kota negara yang ideal. Penelusuran pustaka tentang syarat ibu kota negara yang ideal belum ditemukan; berdasarkan pemikiran geografis ibu kota negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis dan kewilayahan antara lain adalah: tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan),

ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antara wilayah. Berdasarkan rumusan tersebut kemudiandikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia untuk menentukan alternative lokasi sebagai calon ibu kota negara.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira memandang, sebelum merealisasikan pemindahan ibu kota, pemerintah dinilai perlu memperhatikan sejumlah risiko. Pertama, dengan telah diketahuinya beberapa lokasi yang menjadi opsi Ibukota Negara nantinya, menjadikan lahan bagi para spekulasi tanah. Ini nanti bisa menyebabkan biaya pembebasan lahan cukup tinggi. Kedua, jika salah satu alasan pemerintah pemindahan ibu kota karena DKI Jakarta sudah terlalu macet, sebenarnya itu bukan solusi terbaik. "Ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Jumlah kendaraan dinas yang berkurang tidak signifikan dibanding kendaraan pribadi dari swasta dan rumah tangga," tambahnya. Risiko ketiga adalah mampu meningkatkan inflasi. Pada kenyataannya, dengan adanya arus urbanisasi sebagai dampak pemindahan ibu kota negara ini akan menimbulkan melonjaknya harga kebutuhan pokok di kota yang menjadi pilihan pemindahan ibu kota. Dan risiko keempat, pemerintah dinilai harus membangun ekonomi masyarakat yang akan menjadi ibu kota baru sebelum nantinya dipindahkan.

Presiden Jokowi sebelumnya telah melakukan peninjauan lokasi di dua tempat yakni, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang ikut dalam rombongan peninjauan. Pemerintah, telah melakukan beberapa penilaian, dan kedua kota tersebut ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yakni Kalimantan Timur ada beberapa poin positif berupa memiliki beberapakota yang besar seperti Balikpapan dan Samarinda dan memiliki jatrak tempuh yang tidak terlalu jauh dari kawasan laut. Selain itu memiliki kondisi topografi perbukitan, sehingga akan menambah keindahan kota serta bisa dijadikan objek wisata yang akan menambah pendapatan Negara dari sector pariwisata. Prasarana di Kalimantan Timur seperti jalan tol juga sudah tersedia, hal ini dapat memudahkan transportasi pemindahan

ibukota. Sedangkan lahan batu bara yang terdapat di Kalimantan Timur masih harus diselidiki lebih dalam lagi.

Untuk Kalimantan Tengah memiliki kelebihan seperti hutan yang masih dalam kondisi baik, jalan yang sebagian besar sudah dibangun, meskipun masih jauh dari perkotaan, namun tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Kalimantan Timur. Kondisi social-budaya baik di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah masih harus di pelajari lebih dalam.

Menurut Institute for Development of Economic and Finance atau Indef menemukan berbagai dampak negatif dari rencana pemindahan ibukota negara ke Pulau Kalimantan. Temuan ini berasal dari riset simulasi yang dilakukan oleh Indef menggunakan model ekonomi keseimbangan umum atau Model CGE (Computable General Equilibrium).

“Pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan PDB riil dan GNE (Gross National Expenditure) riilnya,” kata peneliti Indef, Rizal Taufikurahman.

Pemindahan ibukota tidak kuat memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam skenario pertama yaitu Kalimantan Tengah. Riset Indef menemukan pemindahan ibu kota ke provinsi ini berdampak 1,77 persen terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001 persen. Sebaliknya, pemindahan ibu kota ini berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04 persen.

Sementara itu dalam skenario kedua, Kalimantan Timur. Jika dipindahkan ke daerah ini, dampaknya pada PDB nasional sama sekali tak ada alias 0 persen. Sementara, dampak pada PDRB Kalimantan Timur meningkat hingga 0,24 persen. Lalu, dampak negatif dirasakan pada provinsi lain, kecuali Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Papua dari sisi PDRB.

Selain itu, kata Rizal, pemindahan ibu kota juga menstimulus turunnya jumlah output di hampir semua sektor *tradable-goods* yang berbasis sumber daya alam. Sebaliknya, sektor yang meningkat justru ada pada *non-tradable goods* yang terhitung bukan sektor produktif. Di antaranya yaitu administrasi, pertahanan, pendidikan dan kesehatan, hingga kertas dan publikasi. Menurut Rizal, pemindahan

ibu kota ke Kalimantan Tengah ataupun Kalimantan Timur akan mengerek harga barang di kedua daerah tersebut, Sebab, akan ada tambahan sekitar 2 juta lebih penduduk dan membuat permintaan terhadap barang meningkat. Jika suplainya terbatas, maka harga pun akan otomatis naik. “Kalau terjadi secara bersamaan, maka akan terjadi inflasi,” Meski demikian, Rizal mengakui model ini hanyalah jangka pendek ketika pemindahan ibu kota telah direalisasikan, bukan jangka panjang, Adapun Model CGE dari sebuah perekonomian nasional, kata Rizal, merupakan sistem persamaan yang mencerminkan perilaku semua pelaku ekonomi, yaitu perilaku konsumen dan produsen serta kondisi kliring pasar (Market Clearing Condition). Sementara itu, dalam Dialog Pemindahan ibukota Negara pada 16 Mei 2019, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut pemindahan ibu kota ke luar Jawa justru akan memperkuat fungsi Pusat Kawasan Nasional (PKN) dan Pusat Kawasan Wilayah (PKW), terutama di kawasan Indonesia Timur. “Sehingga bisa membantu mengurangi kesenjangan antara Indonesia Timur dan Barat,”

Menteri PPN/Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan risiko molor, gagal, sampai mangkrak sudah diantisipasi dan tertuang dalam kajian yang selama dikerjakan pemerintah. Untuk memitigasi risiko itu, pemerintah juga memiliki beberapa jurus yang siap yang dilakukan. Pertama, pemindahan ibu kota fokus dilakukan pada wilayah fasilitas pemerintahan. Dari jurus ini, pemerintah sebisa mungkin merancang peta jalan pembangunan yang sistematis, misalnya melihat infrastruktur apa yang sudah ada, yang masih perlu, hingga bagaimana akses dibangun. Kedua, membentuk undang-undang sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota. "Ada dasar hukum UU dan pemindahan mulai paling lambat 2024. Pemindahan kan bisa bertahap, yang penting 2024 sudah bisa berfungsi awal sebagai pusat pemerintahan," ucap Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/8).

Pemerintah dianggap belum mampu menjamin tidak akan terjadi penyimpangan baik dari penggunaan dana maupun pembangunan yang tidak siap tepat pada waktunya. Meskipun, sumber dana pemindahan ibukota berasal dari hasil kerja sama pengelolaan asset berupa gedung kementerian/lembaga.

Sementara untuk persoalan tenaga kerja sangat rentan dengan kenyataan dengan upah tenaga kerja yang cukup tinggi. Upah tenaga kerja di daerah Kalimantan cukup tinggi, cost pembiayaan juga tinggi, apalagi jika terjadi inflasi, dari pihak swasta juga akan sangat memperhitungkan hal ini. Sehingga dikhawatirkan perekonomian di ibukota baru juga tidak mengalami pertumbuhan perekonomian seperti yang diharapkan. Selain itu hal lain yang dikhawatirkan adalah ibukota baru menjadi sepi penduduk. Lain halnya jika pemerintah hanya memindahkan pusat administrasi Negara ke Kalimantan sedangkan yang menjadi kota bisnis tetap berada di Jakarta.

Menurut Eko, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali dengan matang rencana pemindahan ibu kota ini. Toh, bila ingin lompatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, rencana pembangunan kawasan metropolitan jauh lebih realistis ketimbang pindah ibu kota.

Senada, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga juga melihat ada risiko kegagalan dari sisi dampak yang diharapkan terhadap ekspektasi. Hal ini tercermin dari kajian pemerintah yang belum bisa mengungkap seberapa besar dampak ekonomi yang bisa tercipta dari pemindahan ibu kota baru bagi kota-kota di sekitar ibu kota baru dan Indonesia secara keseluruhan.

Pada akhirnya Kajian pemerintah harus pula dilengkapi dengan antisipasi bila rencana ini gagal di tengah jalan hingga tidak 100 persen berhasil ketika sudah terlanjur dibangun. Ia mengambil contoh pemindahan ibu kota yang dilakukan Brasil dari Rio De Janeiro ke Brasilia. Toh, pusat kota pada akhirnya tetap ada di Rio.

Begitu pula dengan beberapa kota baru yang dibentuk oleh pemerintah China. Nyatanya, kota-kota tersebut hanya menjadi tempat kerja, tapi tidak membuat masyarakat benar-benar ingin tumbuh di sana. Sebab, tidak ada unsur kebudayaan yang berhasil menunjang sisi sosial. Padahal, syarat pembentukan kota sejatinya tidak cukup memiliki aspek geografis dan ekonomi, namun juga kebudayaan. Dengan berbagai alasan tersebut, Nirwono menilai pemindahan ibu kota tidak perlu dilakukan. Justru, lebih baik pemerintah membenahi Jakarta saja, ibu kota yang sudah 'terlanjur' jadi, meski memiliki latar belakang pusat perdagangan dari pemerintahan Hindia Belanda.

Alternatif pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa, pilihannya adalah Kalimantan dan Sumatera. Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota Negara yang sangat ideal. Kelemahannya adalah prasarana dan sarana belum memadai, sebagian besar harus membangun yang baru, berarti biaya mahal. Kelemahan lainnya adalah penyediaan air bersih; kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan. Sumatra merupakan alternatif lain, ketersediaan lahan memadai; sebelah barat Bukit Barisan rawan terhadap bencana gempa, sehingga daerah yang sesuai tentunya di sebelah timur Bukit Barisan. Alternatif pemindahan lokasi ibu kota negara tersebut di atas, baik yang tetap di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa merupakan awal dari pemikiran yang masih perlu didiskusikan secara mendalam. Tentunya masih banyak alternatif lain untuk pemindahan ibu kota negara, mengingat jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17.000.

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang pernah melontarkan ide memindahkan ibukota negara ke Kalimantan Tengah. Persisnya ke kota Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Mimpi Presiden Soekarno untuk memindahkan ibukota Negara itu dilontarkan pada tahun 1950-an. Saat itu, putra sang fajar tersebut sudah meramalkan bahwa Jakarta akan tumbuh tak terkendali. Pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara, yaitu:

1. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia.
2. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa.
3. Ketiga, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda, dan Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tapi sesuatu yang orisinal.

Satu hal lagi, seperti Jakarta yang punya Ciliwung, Palangkaraya juga punya sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain. Ia juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai. Untuk mewujudkan ide tersebut, Soekarno bekerjasama dengan Uni Soviet.

Para insinyur dari Rusia pun didatangkan untuk membangun jalan raya di lahan gambut. Pembangunan ini berjalan dengan baik. Tapi seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 1960-an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca 1965, Soekarno dilengserkan. Pada pemerintahan Presiden RI sekarang, Opsi pemindahan ibukota dari Jakarta sudah dikaji pemerintah sejak 3 Maret 2010, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, telah menyelenggarakan sebuah Strategic Policy Discussion bertajuk “Mengkaji Wacana Pemindahan Ibukota Negara: Strategi Membangun Berkeadilan”.

Menurut Velix, Presiden selaku kepala negara melihat perlunya mengkaji wacana pemindahan Ibukota. Kondisi Jakarta sebagai sebuah ibu kota negara dirasakan semakin tidak nyaman. Beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta dirasakan semakin tidak optimal terutama akibat penyimpangan penataan ruang dan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas, bencana banjir, dan kerawanan gempa. "Sehingga wacana kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta relevan dikemukakan."¹¹ Meski demikian ada beberapa hal yang masih pro dan kontra terhadap wacana tersebut, gubernur Kalimantan Tengah mengakui bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari beberapa tokoh masyarakat tentang wacana tersebut, terutama dampak perubahan sosiologis dari masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam karakteristik masyarakat sub-urban menjadi masyarakat ibu kota yang hidup dalam karakteristik masyarakat metropolitan. Adanya kekhawatiran mengenai potensi terpinggirnya masyarakat lokal tersebut menuntut adanya perencanaan yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak sosial apabila wacana pemindahan ibu kota negara benar-benar terwujud.¹²

Rekomendasi pemindahan Ibu Kota keluar Jawa justru berangkat dari keprihatinan akan daya dukung ekosistem dan bencana sosial di kota-kota besar di Jawa (seperti 1997-1998). Cadangan air bersih di Jawa saat ini hanya 20% dari kebutuhan. Tanah pertanian di Jawa tingkat kesuburannya lebih dari 3 kali lipat kesuburan lahan di luar Jawa. Perlahan tapi pasti, lahan pertanian itu terus diciutkan utk dikonversi menjadi kawasan industri, kota baru, proyek-proyek properti. Dengan model perkembangan seperti ini, kaum miskin desa sebagian besar hanya berpindah

status menjadi kaum miskin kota. Kalangan menengah bawah, yang satu atau dua level di atas kaum miskin kota, hidup dalam ketegangan dan stress yang semakin tinggi di luar ruang di kota-kota besar (Jakarta, Bandung dan sekitarnya). Hutan di Jawa pun makin menipis, sehingga menimbulkan ancaman banjir yang akan semakin mempersulit kehidupan para petani. Sebaliknya, di luar Jawa cadangan air bersih melimpah, sumber energi berlimpah. Mengapa kita tidak pindahkan sebagian kawasan industri ke luar Jawa, selain memindahkan juga ibu kota pemerintahan. Itulah alasan-alasan merekomendasikan pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

Dilihat dari aspek perekonomian pada akhir tahun 2019 perekonomian Kalimantan Tengah cukup baik, meskipun diawal tahun 2019 perekonomian Kalimantan Tengah melambat. Dibandingkan tahun 2018, perekonomian Kalimantan Tengah menaik pada tahun 2019.

Memindahkan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Tengan. Persisnya ke kota Palangkaraya, yang dibelah oleh sungai Kahayan. Pertimbangan Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibukota negara. Pertama, Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Ketiga, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota Negara yang sangat ideal. Kelemahannya adalah prasarana dan sarana belum memadai, sebagian besar harus membangun yang baru, berarti biaya mahal. Kelemahan lainnya adalah penyediaan air bersih, kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan.

Kesimpulan

Pemindahan IKN berangkat dari kenyataan bahwa ibu kota saat ini sudah menanggung beban sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis. Pemindahan IKN memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat inflasi yang tetap rendah. Selain itu pertumbuhan wilayah industri dengan rantai nilai hingga hilir akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan menurunkan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau

Jawa. Pemindahan IKN juga memiliki risiko terutama bersumber dari kebutuhan pembiayaan. Skema pembiayaan untuk pembangunan kota baru beserta infrastrukturnya memiliki risiko jangka panjang apalagi sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah selayaknya memperhatikan aspek perencanaan dan tata ruang wilayah sehingga penggunaan lahan dapat efektif dan meminimalisir kemungkinan inflasi dari kenaikan harga lahan yang tidak terkendali. DPR RI secara berkelanjutan harus memantau perkembangan pembangunan IKN baru melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Komisi V (infrastruktur), Komisi XI (keuangan), dan komisi terkait lainnya.

Endnote

¹ Lihat http://indonesiabaik.id/mation_grafis/dampak-ekonomi-pemindahan-ibu-kota.

² Bappenas, diakses pada 26 Juni 2019

³ Kompas, diakses pada 5 Mei 2019

⁴ Fleisher, diakses pada et. al, 2019.

⁵ Bappenas, diakses pada 26 Juni 2019.

⁶ liputan6.com, diakses pada 26 Juni 2019.

⁷ Bappenas, diakses pada 26 Juni 2019.

⁸ kaltim.tribunnews.com, diakses pada 21 Agustus 2019.

⁹ Liputan 6.com diakses pada 26 Januari 2019.

¹⁰ <http://investor.id/business/menteri-ppn-pemindahan-ibu-kota-turunkan-kesenjangan-pendapatan>.

¹¹ Amri AB. SBY Kaji Pindahkan Ibukota Sejak Maret [Online]. 2010. <https://www.viva.co.id/berita/politik/168665istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret>. Diakses pada 26 April 2018.

¹² Toun NR. Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Jurnal Academia Praja* 1: 129–148, 2018.

Daftar Pustaka

- Amri AB. SBY Kaji Pindahkan Ibukota Sejak Maret [Online]. 2010. <https://www.viva.co.id/berita/politik/168665istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret> [26 Apr. 2018].
- Antaraneews.com. (19 Juli 2019). “Pemindahan Ibu Kota”, <https://www.antaraneews.com/berita/965428/pemindahan-ibukota-ke-kalimantan-diyakiningkatkan-arus-perdagangan>, diakses 22 Agustus 2019.

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2019, Berita Resmi Statistik, No. 39/05/Th.XXII, 6 Mei 2019
- Ghozali, Dody M. (2005). *Communication Measurement; Konsep Dan Aplikasi Pengukuran Kinerja Public Relation*. Bandung: Simbiosis Ekatama Media.
- Hartati, Enny Sri. (2019). “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara”, Kompas, 27 Agustus 2019, hal.1.
- Ide Jokowi Soal Metropolitan Baru di Luar Jawa Dorong Sektor Properti”, Kompas, 5 Mei 2019, hal. 5.
- Liputan6.com (26 Juni 2019). “Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Inflasi 2%”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998755/pemindahan-ibukotadongkrak-inflasi-02-persen?>, diakses 21 Agustus 2019.
- Masinambow, Hidayat, Rahayu S. (2001). *Semiotik : Menkaji Tanda Dalam Artifak*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexi J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi.
- “Negara-Negara yang Mengalami Relokasi Ibu Kota”, Koran Tempo, 15 Agustus 2019, hal. 3.
- Nurzaman, S. S.. (2012). *Perencanaan wilayah dalam konteks Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Negara”, Paparan dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, and Beautiful, 26 Juni 2019.
- Nurzaman, S. S.. (2012). *Perencanaan wilayah dalam konteks Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- NR, T. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Academia Praja*, 1, 129–148.

Sobur, Alex. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, Dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Regional Inequality in China”, *Journal of Development Economics*, Vol. 92, Issue 2, pp. 215-231.

Tribunnews.com. (21 Agustus 2019). “Pemindahan Ibu Kota“, <https://kaltim.tribunnews.com/2019/08/21/pemindahan-ibu-kota-rei-kaltimkhawatir-inflasi-tinggi-bisa-gagalkanpenetapan-lokasi-ibu-kota-baru>, diakses 21 Agustus 2019.

Wibowo, Indiwana Seto Wahyu. (2013). *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yahya, H.M, *Pemindahan Ibu Kota Negara Baru dan Sejahtera*. 2018. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.kemerdekaan>.